



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB II berisi :

- 2.1. Perencanaan
- 2.2. Strategi, arah kebijakan, program & indikator kinerja dalam RPJMD 2010-2015
- 2.3. Perjanjian Kinerja
- 2.4. Indikator Kinerja Utama Provinsi Jambi

2.1. Perencanaan

2.1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

2.1.2. Visi Pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2010 – 2015, yaitu :

J A M B I E M A S 2015

“EKONOMI MAJU, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA”

- Ekonomi Maju** : mengartikan bahwa adanya pergerakan kondisi perekonomian kearah yang lebih baik yang tergambar dari laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dibarengi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup. Selain itu, juga ditandai dengan struktur ekonomi yang kokoh yang mampu mencapai produktifitas tinggi dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Aman** : keadaan yang menggambarkan perwujudan memiliki perasaan aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju; serta memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya, yang dilandasi supremasi hukum dan Hak Azasi Manusia yang tinggi.
- Adil** : mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
- Sejahtera** : mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan sandang dan pangan secara merata.

2.1.3. Misi Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015, sebagai berikut :



- 1) **Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum** yaitu meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan umum yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum untuk menunjang produktifitas dan mobilitas publik;
- 2) **Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya** yaitu pembangunan yang menekankan pada pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditandai dengan membaiknya taraf pendidikan dan derajat kesehatan penduduk, yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan sosial dasar bagi masyarakat serta mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta berdaya saing untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera;
- 3) **Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri** yaitu mengembangkan perekonomian daerah yang berlandaskan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah, yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal berbasis agribisnis dan agroindustri sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat;
- 4) **Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Optimal dan Berwawasan Lingkungan** yaitu melaksanakan pembangunan yang memanfaatkan ekonomi Sumberdaya Alam dengan tetap menjaga keseimbangan antara pemanfaatan serta keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan;
- 5) **Meningkatkan Tata Pemerintahan yang baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender** yaitu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, dan terbentuknya birokrasi pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi, menjamin kepastian hukum, melindungi segenap masyarakat serta memberikan akses dan kesempatan bagi penduduk laki-laki dan perempuan agar memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan merata.

2.1.4. Tujuan Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka pembangunan strategis Provinsi Jambi untuk periode 5 tahun. Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2009 – 2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025, maka sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah, RPJMD menjadi pijakan bagi perencanaan strategis baik SKPD Provinsi maupun Kabupaten/Kota, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan.

Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD tersebut, maka kedepan tujuan pembangunan daerah provinsi Jambi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Mewujudkan Jambi dengan infrastruktur pelayanan umum yang berkualitas dan ketersediaan yang lebih baik
2. Mewujudkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kondisi masyarakat Jambi yang berkehidupan beragama dan berbudaya
3. Mewujudkan Jambi dengan struktur ekonomi yang kokoh dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi



4. Menciptakan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan
5. Mewujudkan kualitas kinerja birokrasi pemerintah secara profesional dalam memenuhi kepentingan umum

2.1.5. Sasaran

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran per-Misi yang hendak dicapai Provinsi Jambi dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum, dengan sasaran:
 - a. Kualitas ketersediaan infrastruktur meningkat
 - b. Pembangunan infrastruktur energi dan listrik meningkat
 - c. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi dan air bersih
2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Budaya, dengan sasaran :
 - a. Pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas meningkat
 - b. Layanan kesehatan masyarakat meningkat, terutama layanan bagi masyarakat kurang mampu.
 - c. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial
3. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis/Agroindustri, serta Investasi, dan Kepariwisata dengan sasaran :
 - a. Investasi meningkat
 - b. Kunjungan dan industri kepariwisataan daerah meningkat
 - c. Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan meningkat
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Terpadu yang Optimal dengan Mengedepankan Penataan Ruang dan Lingkungan, dengan sasaran :
 - a. Kualitas kelestarian sumber daya air & lahan meningkat
 - b. Kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup meningkat
5. Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum Serta Kesetaraan Gender, dengan sasaran :
 - a. Pengelolaan tata pemerintahan yang baik meningkat
 - b. Partisipasi & peran perempuan dalam pembangunan meningkat

Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Akhir 2015
1.	Kualitas ketersediaan infrastruktur meningkat	– Persentase jalan Provinsi Jambi dalam kondisi mantap (kondisi baik, sedang)	68,98 (1.037 Km)	75
2.	Pembangunan infrastruktur energi dan listrik meningkat	– Persentase Rasio elektrifikasi – Persentase pengembangan energi baru terbarukan (PLTMH/PLTMS)	49,59 48,90 (9 PLTMH 5.649 PLTS)	82 88 (15 PLTMH 7.084 PLTS)
3.	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi, dan air bersih	– Persentase fungsionalisasi daerah irigasi – Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	60,62 44,32 (MDGs)	66,35 68,87 (MDGs)



		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	40,93 (MDGs)	62,41 (MDGs)
4.	Pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas meningkat	Angka partisipasi murni (APM) - SD (%) - SMP (%) - SMA (%)	91,5 66,9 45,7	100 90 78
5.	Layanan kesehatan masyarakat meningkat, terutama layanan bagi masyarakat kurang mampu.	Prevalensi kekurangan gizi pada balita (kasus gizi buruk balita tertangani) Persentase puskesmas berkinerja baik	100% kasus tertangani 50	100% kasus tertangani 85
6.	Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial	Persentase menurunnya rumah tangga sangat miskin Indeks pembangunan manusia	8,34 72,74	5 74,5
7.	Investasi meningkat	Nilai investasi PMA Nilai investasi PMDN Nilai Ekspor Persentase koperasi berkualitas Peningkatan pelaku UMKM Laju inflasi provinsi Jambi	US\$448,4jt Rp. 11,2 T US\$ 1.209.672 69,49 (902 unit) 65.240 10,42	US\$1.161,3jt Rp. 18,26 T US\$2.000.000 78 (1.600 unit) 82.000 5,53
8.	Kunjungan dan industri kepariwisataan daerah meningkat	Pertumbuhan kunjungan wisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1.110.000 wisatawan 14,53	1.554.319 wisatawan 19
9.	Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan meningkat	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Persentase nilai tukar petani (NTP) tanaman pangan Ketersediaan energi/kap/perhari	27,9 96 1.929 gr/kap/hr	28 - 28,5 104 – 106 2.000 gr/kap/hr
10.	Kualitas kelestarian sumber daya air, dan lahan meningkat	Penurunan titik api (hot spot)	1.782 titik	300 titik
11.	Kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup meningkat	Persentase luasan lahan tertutup pohon (rehabilitasi hutan & lahan kritis) Penurunan emisi gas rumah kaca (kemampuan penanganan emisi GRK)	64,80 (1.120.355Ha) 2,5 MtCO ₂	65,5 (1.120.855Ha) 17,25 MtCO ₂



12.	Pengelolaan tata pemerintahan yang baik meningkat	- Opini BPK terhadap laporan keuangan & asset daerah - Aksi daerah pencegahan & pemberantasan korupsi Provinsi Jambi, dan Kab/Kota - Skor indeks kepuasan masyarakat (IKM) Provinsi Jambi - Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja Pemprov. Jambi	WDP - - - C (44,32)	WTP 8 aksi (kategori hijau) 75% (kategori hijau) >85 "A" B (65)
13.	Partisipasi & peran perempuan dalam pembangunan meningkat	Persentase kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (dilihat dari APM 15-24 T)	96	97,5

2.2. Strategi, Arah Kebijakan Daerah, Program dan Indikator Kinerja Dalam RPJMD 2010 - 2015

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan, dan program. Selain itu, untuk mengukur capaian kinerja, maka dirumuskan pula indikator sebagai tolok ukur kinerja.

2.2.1. Strategi

Strategi yang ditempuh untuk mencapai misi, antara lain sebagai berikut :

1. Strategi untuk mencapai misi *Meningkatkan infrastruktur wilayah dan Pelayanan umum*, adalah :
 - a) Melakukan percepatan pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan serta infrastruktur listrik terutama bagi daerah yang belum terjangkau oleh transportasi darat. Hal ini dilakukan demi kelancaran transportasi orang, barang dan jasa terutama dari kawasan sentra produksi ke pusat-pusat pemasaran.
 - b) Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Irigasi dan Air Bersih dengan cara mengoptimalkan pemenuhan infrastruktur pertanian seperti waduk dan irigasi karena infrastruktur ini secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat terutama petani. Selain itu pemenuhan kebutuhan infrastruktur pertanian tersebut juga akan meningkatkan produksi padi khususnya, sehingga akan meningkatkan ketahanan pangan Provinsi Jambi.
 - c) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana seperti buku, alat-praktik, alat peraga dan alat-alat laboratorium sekolah.
2. Strategi untuk mencapai misi *Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta sosial budaya*, adalah :
 - a) Pemerataan Akses Terhadap Pendidikan Berkualitas, Perluasan akses pendidikan dasar sampai pendidikan menengah termasuk akses pembiayaan bagi penduduk miskin, serta distribusi tenaga pendidik yang proporsional antar daerah maupun antara sekolah pada daerah yang sama, terutama yang berhubungan dengan tenaga pendidik bagi bidang ilmu tertentu.
 - b) Meningkatkan Peran Agama dan Budaya Dalam Pembangunan dengan memasukkan mata ajar muatan lokal yang menyentuh langsung terhadap kepentingan daerah masing-masing.



- c) Meningkatkan Peran Pemuda pemuda baik sebagai individu maupun organisasi kepemudaan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam bidang kewirausahaan, serta meningkatkan sarana dan prasarana olahraga.
 - d) Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan dengan cara mengoptimalkan kinerja pelayanan kesehatan serta mendorong perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat.
3. Strategi untuk mencapai misi *Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Agroindustri*, adalah :
- a) Meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga rakyat secara lebih konkret menjadi subyek dan aset aktif pembangunan, membangkitkan daya saing produk unggulan wilayah agar makin kompetitif, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata.
 - b) Mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan potensi lokal dengan mengedepankan peran serta masyarakat, meningkatkan inovasi, penajaman promosi, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, pengembangan SDM pariwisata, serta sinergisitas antar pelaku wisata.
4. Strategi untuk mencapai misi *Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Terpadu yang Optimal dengan Mengedepankan Penataan Ruang dan Lingkungan*, adalah :
- a) Meningkatkan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan dengan cara menyiapkan lahan-lahan potensial bagi tanaman pangan dan hortikultura sehingga luas baku lahan pertanian pangan & hortikultura akan terus meningkat.
 - b) Melakukan reklamasi tambang yang dikelola secara ekologis dan ekonomis, sehingga menimbulkan dampak positif terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup fisik meliputi air, udara, tanah, dan bentang alam, ataupun nonfisik seperti sosial ekonomi dan budaya masyarakat.
 - c) Meningkatkan kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup dengan cara melakukan pengawasan secara intensif terhadap pengelolaan hutan dan lahan, serta Pemanfaatan ruang terkendali.
5. Strategi untuk mencapai misi *Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum Serta Kesetaraan Gender*, adalah:
- a) Meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel.
 - b) Meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, perbaikan dan peningkatan kinerja BUMD, serta optimalisasi pendapatan daerah.

2.2.2. Arah Kebijakan Daerah

1. Arah kebijakan daerah untuk mencapai misi pertama *Meningkatkan infrastruktur wilayah dan Pelayanan umum*, adalah :
 - a. Meningkatkan kualitas ketersediaan infrastruktur jalan dengan kondisi mantap dari 68,98% menjadi 75%.
 - b. Meningkatkan pembangunan infrastruktur energi dan listrik : rasio elektrifikasi dari 53,44 menjadi 82%, dan desa yang memakai energi baru terbarukan (PLTMH/PLTS) dari 9 PLTMH / 5.649 PLTS menjadi 15 PLTMH / 7.084 PLTS.
 - c. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi dan air bersih ;
 - Persentase fungsionalisasi daerah irigasi dari 60,62% menjadi 66,35%



- Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan dari 44,32% menjadi 68,87%.
 - Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan dari 40,93% menjadi 62,41%.
2. Arah kebijakan daerah untuk mencapai misi kedua *Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta sosial budaya*, adalah :
- a. Meningkatkan pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas, dilihat melalui indikator ;
 - Angka partisipasi murni (APM)
 - APM SD dari 95,6% menjadi 100%.
 - APM SMP dari 66,9% menjadi 90%.
 - APM SMA dari 45,7% menjadi 78%.
 - b. Meningkatkan layanan kesehatan masyarakat, terutama layanan bagi masyarakat kurang mampu. Dilihat melalui indikator ;
 - Prevalensi kekurangan gizi pada balita (penanganan kasus balita gizi buruk) dari 100% menjadi 100%.
 - Persentase puskesmas yang berkinerja baik dari 50% menjadi 85%.
 - c. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, dilihat dari indikator ;
 - Persentase menurunnya rumah tangga sangat miskin dari 8,34% menjadi 5%.
 - Indeks pembangunan manusia dari 72,74% menjadi 74,5%.
3. Arah kebijakan daerah untuk mencapai misi ketiga *Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Agroindustri*, adalah :
- a. Meningkatkan nilai investasi, dilihat dari indikator ;
 - Nilai investasi PMA dari US\$448,4jt menjadi US\$1.161,3jt.
 - Nilai investasi PMDN dari Rp. 11,2 Triliun menjadi Rp. 18,36 Triliun.
 - Nilai Ekspor dari US\$ 1.209.672 menjadi US\$ 2.000.000.
 - Persentase koperasi berkualitas dari 69,49% menjadi 78%.
 - Peningkatan jumlah pelaku usaha mikro, kecil, menengah dari 65.240 unit menjadi 82.000 unit.
 - Laju inflasi provinsi Jambi dari 10,42% menjadi 5,53%.
 - b. Meningkatkan kunjungan, dan industri kepariwisataan daerah, yang dilihat dari indikator ;
 - Pertumbuhan kunjungan wisata dari 1.110.000 wisatawan menjadi 1.554.319 wisatawan.
 - Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dari 14.53% menjadi 19%.
 - c. Meningkatkan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan, dilihat dari indikator ;
 - Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari 27,9% menjadi 28% - 28,5%.
 - Persentase nilai tukar petani (NTP) dari 96% menjadi 104 – 106%.
 - Ketersediaan energi/kap/perhari dari 1.929gr/kap/hr menjadi 2.000gr/kap/hr.
4. Arah kebijakan daerah untuk mencapai misi keempat *Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Terpadu yang Optimal dengan Mengedepankan Penataan Ruang dan Lingkungan*, adalah :
- a. Meningkatkan kualitas kelestarian sumber daya air & lahan, dilihat dari indikator ;
 - Penurunan titik api (hot spot) dari 1.782 titik menjadi 300 titik.



- b. Meningkatkan kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup, dilihat dari indikator ;
 - Persentase luasan lahan tertutup pohon dari 64,80% menjadi 65,5%.
 - Penurunan emisi gas rumah kaca (kemampuan penanganannya) dari 2,5 MtCO₂ menjadi 17,25 MtCO₂.
- 5. Arah kebijakan daerah untuk mencapai misi ke lima *Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, serta Kesetaraan Gender*, adalah :
 - a. Meningkatkan Pengelolaan tata pemerintahan yang baik, dengan indikator;
 - Opini BPK terhadap laporan keuangan & asset daerah dari WDP menjadi WTP
 - Aksi daerah pencegahan & pemberantasan korupsi Provinsi Jambi dari 0 aksi menjadi 8 aksi (kategori hijau), dan Kab/Kota dari 0% menjadi 100%
 - Persentase peningkatan indeks kepuasan masyarakat menjadi A.
 - Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja daerah dari C menjadi B (65%).
 - b. Meningkatkan partisipasi & peran perempuan dalam pembangunan, dengan indikator ;
 - Persentase kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (dilihat dari APM 15-24 T) dari 96% menjadi 97,5%.

2.2.3. Program

Untuk mewujudkan capaian keberhasilan misi pembangunan, Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan program pembangunan menurut bidang urusan, yakni :

- 1. Dalam upaya mewujudkan Misi Pertama yakni Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Urusan Wajib Penataan Ruang, melalui program antara lain :
 - (1) Program Perencanaan Tata Ruang.
 - (2) Program Penataan Kawasan.
 - b. Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Pengairan), melalui program antara lain :
 - (1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi.
 - (2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Rawa.
 - (3) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku/Air Tanah.
 - (4) Program Pengendalian Banjir.
 - (5) Program Pembangunan Talud/Turap dan Bronjong.
 - c. Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Cipta Karya), melalui Program antara lain :
 - (1) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.
 - (2) Program Pengembangan Perumahan.
 - (3) Program Pengembangan Kawasan Permukiman.
 - (4) Program Pembangunan Saluran Drainase.
 - (5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.
 - d. Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Bina Marga), melalui program antara lain :
 - (1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
 - (2) Program Inspeksi Jalan dan Jembatan.
 - (3) Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan.
 - (4) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - (5) Program Pembebasan Lahan untuk Jalan dan Jembatan
 - e. Urusan Wajib Perhubungan, melalui program antara lain :



- (1) Program Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan.
 - (2) Program Pengembangan Transportasi Perkotaan.
 - (3) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.
 - (4) Program Transportasi Udara.
 - (5) Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- f. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral, melalui program antara lain :
- (1) Program Pengembangan Potensi dan Kecukupan Energi Listrik dan Bahan Bakar
 - (2) Program Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan.
2. Dalam upaya mewujudkan Misi Kedua yakni Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
- a. Urusan Wajib Pendidikan melalui program antara lain :
- (1) Program Pendidikan Anak Usia Dini.
 - (2) Program Wajib Belajar 12 tahun.
 - (3) Program Pendidikan Menengah.
 - (4) Program Pendidikan Non-Formal.
 - (5) Program Pendidikan Luar Biasa.
 - (6) Program Pendidikan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan.
 - (7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
- b. Urusan Wajib Kesehatan melalui program antara lain :
- (1) Program Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.
 - (2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
 - (3) Program Pengawasan Obat dan Makanan.
 - (4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan.
 - (5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
 - (6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
 - (7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
 - (8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
 - (9) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.
 - (10) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
 - (11) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan.
 - (12) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.
 - (13) Program Upaya Kesehatan Perorangan.
 - (14) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.
 - (15) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya.
 - (16) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata.
 - (17) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata.
- c. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga, melalui program antara lain:
- (1) Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan.
 - (2) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.
 - (3) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.
 - (4) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga.
 - (5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.
 - (6) Program Kebijakan dan Pengembangan Kepemudaan dan Olah Raga.



- d. Urusan Wajib Perpustakaan, melalui program antara lain :
 - (1) Program Pengembangan Budaya Membaca dan Pembinaan Perpustakaan.
 - (2) Pelestarian dan Pemeliharaan Bahan Pustaka
- e. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan melalui program antara lain :
 - (1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.
 - (2) Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
 - (3) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
 - (4) Program Pembinaan Anak Terlantar.
 - (5) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.
 - (6) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo.
 - (7) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya).
 - (8) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
 - (9) Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial.
- f. Urusan Wajib Kebudayaan melalui program antara lain :
 - (1) Program Pengembangan Nilai Budaya.
 - (2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
 - (3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
 - (4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.
- g. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika melalui program antara lain :
 - (1) Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi.
 - (2) Program Pengembangan Aplikasi Telekomunikasi.
 - (3) Program Pengembangan Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.
- 3. Dalam upaya mewujudkan Misi Ketiga yakni Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, melalui program antara lain :
 - (1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM.
 - (2) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM.
 - (3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
 - (4) Program Pengembangan Kemitraan.
 - (5) Program Perkuatan Permodalan UMKMK.
 - (6) Program Peningkatan Pemasaran Hasil UMKMK.
 - (7) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang kondusif.
 - (8) Program Peningkatan Kegiatan Usaha UMKMK
 - b. Urusan Wajib Penanaman Modal, melalui program antara lain :
 - (1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
 - (2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
 - (3) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.
 - c. Urusan Wajib Ketenagakerjaan, melalui program antara lain :
 - (1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
 - (2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
 - (3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.



- d. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, melalui program antara lain:
 - (1) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.
 - (2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - (3) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
 - (4) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya.
 - (5) Program Pengembangan Data dan Informasi.
 - (6) Program peningkatan kapasitas kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - (7) Program Kerjasama Pembangunan
 - (8) Program Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
- e. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melalui program antara lain :
 - (1) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat.
- f. Urusan Pilihan Industri, melalui program antara lain :
 - (1) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.
 - (2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
 - (3) Program Penataan Struktur Industri
- g. Urusan Pilihan Perdagangan, melalui program antara lain :
 - (1) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.
 - (2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
 - (3) Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan.
 - (4) Program Pengembangan Standarisasi Nasional.
- h. Urusan Pilihan Pariwisata, melalui program antara lain :
 - (1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
 - (2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
 - (3) Program Pengembangan Kemitraan.
- i. Urusan Pilihan Pertanian (Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura), melalui program antara lain :
 - (1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
 - (2) Program Peningkatan Nilai Tambah Agribisnis.
 - (3) Program Peningkatan Pemasaran Produk Pertanian.
- j. Urusan Pilihan Pertanian (Perkebunan) melalui program antara lain :
 - (1) Program Pengembangan Kelembagaan Usaha Perkebunan.
 - (2) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
- k. Urusan Pilihan Kehutanan, melalui program antara lain :
 - (1) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Kehutanan.
- l. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral dengan program sebagai berikut :
 - (1) Program Promosi Investasi Sektor Pertambangan dan Energi
 - (2) Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat Sekitar Wilayah Tambang.
- 4. Dalam upaya mewujudkan Misi Keempat yakni Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Optimal dan Berwawasan Lingkungan, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Urusan Wajib Ketahanan Pangan melalui program antara lain :
 - (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan.



- (2) Program Lumbung Pangan.
- b. Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Bina Marga) melalui program antara lain :
 - (1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- c. Urusan Wajib Lingkungan Hidup melalui program antara lain :
 - (1) Program Pengendalian dan Pengrusakan Lingkungan.
 - (2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
 - (3) Program Fasilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA
 - (4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH
- d. Urusan Pilihan Pertanian (Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura), melalui program antara lain :
 - (1) Program Pengembangan Sentra-sentra Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - (2) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - (3) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian.
 - (4) Program Perbaikan dan Penyediaan Infrastruktur/Sarana dan Prasarana Pertanian
- e. Urusan Pilihan Pertanian (Perkebunan), melalui program antara lain :
 - (1) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan.
 - (2) Program Pengembangan Perbenihan Perkebunan.
 - (3) Program Pengembangan Proteksi Tanaman Perkebunan.
 - (4) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkebunan .
 - (5) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
 - (6) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian
- f. Urusan Pilihan Kehutanan, melalui program antara lain :
 - (1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.
 - (2) Program Kemitraan.
 - (3) Program Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
 - (4) Program Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Produksi.
 - (5) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
 - (6) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Pembangunan Desa Mandiri Pangan dan Pembangunan Lumbung Desa.
- g. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral, melalui program antara lain :
 - (1) Program Pengembangan Energi.
 - (2) Program Survei Geologi dan Sumberdaya Mineral, Mitigasi Bencana Alam Geologi, dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral.
 - (3) Program Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan.
 - (4) Program Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan dan Pertambangan.
 - (5) Program Pembinaan dan Pengawasan K3 Pertambangan.
 - (6) Program Pengembangan Sumur Tua dan Pengusahaan Migas.
 - (7) Program Pengembangan Potensi Energi Lokal/Desa.
- 5. Dalam upaya mewujudkan Misi Kelima: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian melalui program antara lain :



- (1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
 - (2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - (3) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
 - (4) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
 - (5) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
 - (6) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
 - (7) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
 - (8) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
 - (9) Program Penataan Daerah Otonomi Baru.
 - (10) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - (11) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
 - (12) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan.
 - (13) Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.
 - (14) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
 - (15) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
 - (16) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
 - (17) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
 - (18) Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Akses Publik Terhadap Informasi Hukum
 - (19) Program Perencanaan dan Perbantuan Hukum
 - (20) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
 - (21) Program Pengelolaan Kekayaan Daerah
 - (22) Program Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan Ekonomi
 - (23) Program Pembinaan dan Fasilitas Kesejahteraan Sosial
 - (24) Program Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan SDA
- b. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika melalui program antara lain:
- (1) Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - (2) Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Massa.
 - (3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
 - (4) Program Pengembangan Pemetaan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi
 - (5) Program Penghimpunan Data dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan
- c. Urusan Wajib Kearsipan dengan program sebagai berikut :
- (1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
 - (2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.
 - (3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan.
- d. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam negeri dengan program sebagai berikut :
- (1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
 - (2) Program Perwujudan Lembaga Demokrasi yang makin kokoh.
 - (3) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.
 - (4) Program Pendidikan Politik Masyarakat.
 - (5) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.



- e. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melalui program antara lain :
- (1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
 - (2) Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
 - (3) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
 - (4) Program Keluarga Berencana
 - (5) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
- f. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui program antara lain :
- (1) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
 - (2) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan.
 - (3) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
 - (4) Program Penerapan Pemerintahan yang baik.
 - (5) Program Peningkatan Kesehatan Ibu Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Desa
 - (6) Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu PAUD

2.2.4. Rencana Kinerja 2014

Kerangka pembangunan dalam konteks negara kesatuan mengandung arti terdapatnya kesesuaian antara kerangka pembangunan di tingkat pusat dengan pembangunan di daerah, dalam satu wadah bernama pembangunan nasional. Karenanya, prioritas pembangunan di daerah juga disusun dengan mengacu dan mendukung prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2010-2014. Prioritas nasional yang dimaksud adalah :

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan Kemiskinan;
5. Ketahanan Pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim Investasi dan Usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan Hidup dan Bencana;
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluas, dan Pasca Konflik;
11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi, serta 3 Prioritas lainnya yaitu (1) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; (2) Bidang Perekonomian dan; (3) Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Tabel 2.2. Prioritas dan Sasaran Strategis RPJMN untuk Pemerintah Provinsi Jambi

Provinsi	Tahun	
	2010	2014
Pertumbuhan Ekonomi	4,8 – 5,3	6,9 – 7,6
Kemiskinan (%)	7,2 – 8,0	4,6 – 5,1
Pengangguran (%)	4,2 – 4,7	3,1 – 3,5
Angka Kematian Bayi	27	24
Rata-Rata Lama Sekolah	7,84	8,08
Angka Harapan Hidup	70,43	71,26
Pendapatan Perkapita (Rp.Ribu)	5.853,36	6.843,80

Sumber : RPJMD Provinsi Jambi 2010-2015

Uraian prioritas pembangunan ini kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Ini bisa dimaknai



bahwa target pencapaian tahunan, adalah merupakan bagian dari target yang lebih strategis seperti pencapaian target jangka menengah (5 tahunan).

2.2.5. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program program prioritas untuk mendukung masing-masing sasaran Indikator Kinerja Utama tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.3. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2014

No.	Sasaran	Didukung Jumlah Program
1.	Kualitas ketersediaan infrastruktur meningkat	12
2.	Pembangunan infrastruktur energi dan listrik meningkat	11
3.	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi, dan air bersih	7
4.	Pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas meningkat	9
5.	Layanan kesehatan masyarakat meningkat, terutama layanan bagi masyarakat kurang mampu.	17
6.	Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial	12
7.	Investasi meningkat	17
8.	Kunjungan dan industri kepariwisataan daerah meningkat	13
9.	Pembangunan pertanian, dan ketahanan pangan meningkat	22
10.	Kualitas kelestarian sumber daya air, dan lahan meningkat	11
11.	Kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup meningkat	10
12.	Pengelolaan tata pemerintahan yang baik meningkat	11
13.	Partisipasi & peran perempuan dalam pembangunan meningkat	9
Total		161

2.2.6. Rencana Anggaran Tahun 2014

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp 1.805.445.316.063,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4. Belanja daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2014

No.	Uraian	Rencana (Rp.)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	1.400.907.552.677,-	10,34
2.	Belanja Langsung	1.805.537.763.386,-	89,66

Sumber : BPKAD Provinsi Jambi

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2014 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :



Tabel 2.5. Alokasi Anggaran per Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran 2014

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	% Alokasi Anggaran
1.	Kualitas ketersediaan infrastruktur meningkat	492.465.120.333,-	32,73
2.	Pembangunan infrastruktur energi dan listrik meningkat	10.396.276.750,-	0,69
3.	Kualitas ketersediaan jaringan irigasi dan air bersih meningkat	328.310.080.222,-	21,82
4.	Pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas meningkat	213.518.807.348,-	14,19
5.	Layanan kesehatan masyarakat terutama bagi masyarakat yang kurang mampu meningkat	308.859.265.363,-	20,53
6.	Perlindungan dan kesejahteraan sosial meningkat	25.781.000.000,-	1,71
7.	Investasi Meningkatkan	17.093.780.000,-	1,14
8.	Kunjungan dan industri kepariwisataan meningkat	19.853.637.900,-	1,32
9.	Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan meningkat	33.513.681.877,-	2,23
10.	Kualitas kelestarian sumber daya air, dan lahan meningkat	15.759.967.793,-	1,04
11.	Kualitas pengelolaan mitigasi, perubahan iklim, dan kelestarian lingkungan hidup meningkat	9.458.789.200,-	0,63
12.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik meningkat	19.131.367.000,-	1,27
13.	Partisipasi dan peran perempuan dalam pembangunan meningkat	10.395.989.600,-	0,69
Jumlah		1.504.537.763.386,-	100
Belanja langsung pendukung		300.907.552.677,-	
Total belanja langsung		1.805.445.316.063,-	

Pada tabel di atas, pada pos belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program utama sebesar Rp. 1.504.537.763.386,- sedangkan anggaran untuk program pendukung sebesar Rp. 300.907.552.677,-.

Pada anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran pembangunan dengan anggaran paling besar adalah sasaran kualitas ketersediaan infrastruktur meningkat dengan besar anggaran Rp. 492.465.120.333,- atau mencapai alokasi anggaran sebesar 32,73%. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran ketersediaan jaringan irigasi dan air bersih meningkat yaitu sebesar Rp. 328.310.080.222,- atau sebesar 21,82% dari total anggaran. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Kualitas pengelolaan mitigasi, perubahan iklim, dan kelestarian lingkungan hidup meningkat sebesar 9.458.789.200,- atau hanya 0,63% dari total anggaran.

2.3. Perjanjian Kinerja

Sebagai upaya percepatan pencapaian sasaran Pemerintah Provinsi Jambi pada akhir periode RPJMD 2010-2015, maka telah ditetapkan langkah strategis yang dijabarkan dalam perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2014 sebagai berikut :



Tabel. 2.6. Perjanjian Kinerja tahun 2014

No	Sasaran	Indikator	Target 2014
1.	Kualitas ketersediaan infrastruktur meningkat	– Persentase jalan Provinsi Jambi dalam kondisi mantap (kondisi baik, sedang)	71
2.	Pembangunan infrastruktur energi dan listrik meningkat	– Persentase Rasio elektrifikasi – Persentase pengembangan energi baru terbarukan (PLTMH/ PLTMS)	75 84,61 (13 PLTMH 6.100 PLTS)
3.	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi, dan air bersih	– Persentase fungsionalisasi daerah irigasi – Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan – Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	65,52 62,90% 60,27%
4.	Pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas meningkat	– Angka partisipasi murni (APM) – SD (%) – SMP (%) – SMA (%)	99,5 87 65
5.	Layanan kesehatan masyarakat meningkat, terutama layanan bagi masyarakat kurang mampu.	– Prevalensi kekurangan gizi pada balita (penanganan kasus balita gizi buruk) – Persentase puskesmas yang berkinerja baik	100 70
6.	Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial	– Persentase menurunnya rumah tangga sangat miskin – Indeks pembangunan manusia	8,30 74%
7.	Investasi meningkat	– Nilai investasi PMA – Nilai investasi PMDN – Nilai Ekspor – Persentase koperasi berkualitas – Peningkatan pelaku usaha mikro, kecil, menengah. – Laju inflasi provinsi Jambi	US\$ 1.001,2jt Rp. 16,52 T US\$ 1.800jt 73.50 81.570 unit 6,12%
8.	Kunjungan dan industri kepariwisataan daerah meningkat	– Pertumbuhan kunjungan wisata – Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1.450.000 wisatawan 17,5
9.	Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan meningkat	– Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB – Persentase nilai tukar petani (NTP) – Ketersediaan energi/kap/perhari	28,5 97 2.000 gr/kap/hr
10.	Kualitas kelestarian sumber daya air, dan lahan meningkat	– Penurunan titik api (hot spot tertangani)	800 titik
11.	Kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup meningkat	– Persentase luasan lahan tertutup pohon – Penurunan emisi gas rumah kaca (kemampuan penurunan emisi GRK)	64.81 (1.120.655Ha) 12 Mt CO2



No	Sasaran	Indikator	Target 2014
12.	Pengelolaan tata pemerintahan yang baik meningkat	- Opini BPK terhadap laporan keuangan & asset daerah - Skor Aksi daerah pencegahan & pemberantasan korupsi Provinsi Jambi, dan Skor ADPPK Kab/Kota - Skor indeks kepuasan masyarakat - Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD	WTP 8 Aksi (kategori hijau) 75 77 (B) B (nilai minimal 65)
13.	Partisipasi & peran perempuan dalam pembangunan meningkat	Persentase kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (dilihat dari APM 15-24 T)	97,5

2.4. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jambi

Pemerintah Provinsi Jambi dalam menjalankan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan senantiasa memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan. Untuk itu, dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Provinsi Jambi mendefinisikan fokus utama pembangunan dalam program prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2010 – 2015 dengan Indikator Kinerja Utama yang akan digunakan untuk mengukur tercapainya tujuan pada akhir periode RPJMD adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum

Tujuan : Mewujudkan Jambi dengan ketersediaan infrastruktur pelayanan umum yang berkualitas dan lebih baik

Sasaran : Meningkatkan kualitas infrastruktur pelayanan umum daerah, pembangunan infrastruktur energi dan listrik, serta terciptanya kualitas dan kesediaan jaringan irigasi dan air bersih.

Tabel 2.7. IKU Misi I

Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Data	Penanggung Jawab
1. Persentase jalan dalam kondisi mantap (baik)	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}} \times 100\%$	Dinas PU, Dishub
2. Rasio elektrifikasi	$\frac{\text{Daya listrik terpasang}}{\text{Jumlah kebutuhan}} \times 100\%$	Dinas ESDM
3. Persentase pengembangan energi baru terbarukan	$\frac{\text{Jumlah RT menggunakan listrik}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$	Dinas ESDM, Bappeda, PU
4. Persentase fungsionalisasi luas daerah irigasi	$\frac{\text{Panjang saluran irigasi}}{\text{Luas lahan budidaya pertanian}}$	Dinas PU
5. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$	Dinas PU, Bappeda



6. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga ber sanitasi}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$	Dinas PU, Bappeda
--	---	-------------------

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya

Tujuan : Mewujudkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kondisi masyarakat Jambi yang berkehidupan beragama dan berbudaya

Sasaran : Terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial

Tabel 2.8. IKU Misi 2

Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Data	Penanggung Jawab
1. Angka partisipasi murni (APM) : - SD (%) - SMP (%) - SMA (%)	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 Tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah siswa usia 16-18 Tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 Tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan, Bappeda, BPMPP
2. Prevalensi kekurangan gizi pada balita	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di satu wil. kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah Seluruh balita gizi buruk yg ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama}}$	Dinas Kesehatan, RSUD
3. Persentase puskesmas berkinerja baik	Kriteria berdasarkan indikator dalam Permenkes Nomor 75 Tahun 2014	Dinas Kesehatan
4. Persentase menurunnya rumah tangga sangat miskin (RTSM)	Angka BPS	Sosnakertrans, Bappeda
5. Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = \frac{1}{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$ dimana : $X_{(1)}$: Indeks harapan hidup $X_{(2)}$: Indeks pendidikan = $\frac{2}{3}(\text{indeks melek huruf}) + \frac{1}{3}(\text{indeks rata-rata lama sekolah})$ $X_{(3)}$: Indeks standar hidup layak	Bappeda



- Misi 3** : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Agroindustri
- Tujuan** : Mewujudkan Jambi dengan struktur ekonomi yang kokoh dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi
- Sasaran** : Terciptanya iklim investasi yang kondusif, peningkatan kepariwisataan daerah, serta terselenggaranya pembangunan pertanian dan ketahanan pangan

Tabel 2.9. IKU Misi 3

Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Data	Penanggung Jawab
1. Persentase koperasi berkualitas	$\frac{\text{Jumlah koperasi berkualitas}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$	Dinas Koperasi
2. Peningkatan pelaku usaha mikro kecil menengah	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro dan kecil}}{\text{Jumlah seluruh UKM}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Disperindag
3. Nilai investasi PMA	Nilai investasi berskala nasional (PMA)	Badan Penanaman Modal Daerah, Bappeda
4. Nilai investasi PMDN	Nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Bappeda, Disperindag
5. Nilai Ekspor	Nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor	Disperindag, Bappeda
6. Laju inflasi provinsi	$[(1 + \Delta Inf_t)(1 + \Delta Inf_{t-1})(1 + \Delta Inf_{t-2})^2] - 1$ Dimana : ΔInf_t = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya t = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi.	Bappeda
7. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata, Bappeda, Disperindag
8. Pertumbuhan kunjungan wisata	$\frac{\text{Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh kunjungan wisata se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata
9. Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/ perkebunan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Dinas Pertanian, Bappeda



Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Data	Penanggung Jawab
10. Nilai tukar petani	$\frac{\text{Indeks yang diterima petani (It)}}{\text{Indeks yang dibayar petani (Ib)}} \times 100$	Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan
11. Ketersediaan energi/kap/perhari dan Persentase pola pangan harapan (PPH)	$\frac{\text{Rata 2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	Badan Ketahanan Pangan, Badan Koordinasi Penyuluhan

Misi 4 : Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Terpadu Yang Optimal Dengan Mengedepankan Penataan Ruang dan Lingkungan

Tujuan : Menciptakan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan

Sasaran : Terwujudnya kualitas dan kelestarian sumber daya air, lahan, serta meningkatnya kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup

Tabel 2.10. IKU Misi 4

Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Data	Penanggung Jawab
1. Penurunan titik api (hot spot)	Pencegahan dan penanggulangan titik api	Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan
2. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%luasan lahan tertutup pohon)	$\frac{\text{Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi}}{\text{Luas total hutan dan lahan kritis}} \times 100\%$	Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan
3. Penurunan emisi gas rumah kaca	$\frac{\text{penurunan emisi tertangani}}{\text{target penurunan emisi gas rumah kaca}} \times 100\%$	Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Sosnakertrans, Dinas PU, Dinas ESDM, Dinas Perhubungan, Disperindag

Misi 5 : Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum Serta Kesetaraan Gender

Tujuan : Mewujudkan kualitas kinerja birokrasi pemerintah secara profesional dalam memenuhi kepentingan umum

Sasaran : Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, jaminan kepastian dan perlindungan hukum, serta meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan

Tabel 2.11. IKU Misi 5

Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Data	Penanggung Jawab
1. Opini BPK	Opini BPK terhadap laporan keuangan dan asset	Inspektorat, Bappeda, Lembaga pusat, Biro Organisasi, seluruh SKPD



Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Data	Penanggung Jawab
2. Aksi daerah pemberantasan korupsi di Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota	Kategori “baik” (hijau) dalam pelaksanaan ADPPK Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota penilaian oleh UKP4	Bappeda, Biro Organisasi, Inspektorat
3. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Jambi	Skor rata-rata IKM	Biro Organisasi, seluruh SKPD
4. Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja daerah	Penilaian atas evaluasi kinerja oleh Kementerian PAN RB RI	Inspektorat, Bappeda, Biro Organisasi
5. Persentase kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	$\frac{\text{APM laki-laki (SD/SMP/MI/SMA)}}{\text{APM perempuan (SD/SMP/MI/SMA)}}$ - kontribusi perempuan dalam pekerjaan non pertanian - rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki	Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Sosnakertrans